GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 613 TAHUN 2025
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
TAHUN 2026

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur dan untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan pengaturan dalam bentuk Peraturan Gubernur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor Nomor 188.34/062/OTDA tanggal 5 Januari 2021 perihal Implementasi Sistem Regulasi Peraturan Daerah Berbasis Elektronik (e-Perda);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 November 2025

GUBERNUR BANTEN,

ANDRA SONI

Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 613 Tahun 2025
Tanggal : 18 November 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
TAHUN 2026

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	TARGET PENETAPAN	KETERANGAN (PILIHAN PERTIMBANGAN DARI DIKTUM KEDUA)
1.	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Banten Tahun 2026-2030	Dinas Perhubungan	1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Januari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

2.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah	Januari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
3.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pakaian Khas Daerah Banten	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pakaian Khas Daerah Banten	Januari	kebutuhan untuk melaksanakan program Pemerintah Provinsi Banten
4.	Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Banten	Inspektorat Daerah	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD; 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;	Januari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

			5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024;		
5.	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah	Biro Organisasi	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten	Januari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
6.	Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi	BPSDMD	Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi	Januari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
7.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	Inspektorat Daerah	1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional; 2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Januari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

8.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Banten	Inspektorat Daerah	Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Januari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
9.	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	BPKAD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.	Januari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
10.	Manajemen Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian Daerah	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN	Januari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
11.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Januari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
12.	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja	Badan Kepegawaian Daerah	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.	Januari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

13.	Pedoman Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi	Dinas Pertanian	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Januari	kebutuhan untuk melaksanakan program Pemerintah Provinsi Banten
14.	Pedoman Penyediaan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah	Biro Umum	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara	Januari	kebutuhan untuk melaksanakan program Pemerintah Provinsi Banten
15.	Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	Januari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
16.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020 - 2040	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020 - 2040	Januari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
17.	Peta Jalan Akselerasi Pengelolaan Sampah Tahun 2026 – 2030	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Februari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

			Sejenis Sampah Rumah Tangga		
18.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Februari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
19.	Pembinaan dan Pengawasan pada Badan Layanan Umum Daerah	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Februari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
20.	Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Bapenda	1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah; 2. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Februari	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
21.	Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian Daerah	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN	Maret	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

22.	Sertifikasi Kebencanaan Usaha Pariwisata	BPBD	Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Banten Tahun 2018 - 2025	April	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
23.	Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perbatasan	Dinas PUPR	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023 – 2043	Mei	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
24.	Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Juni	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
25.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.	BPKAD	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Juni	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
26.	Standar harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2027	BPKAD	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang	Juni	perintah peraturan perundang-

			Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.		undangan yang lebih tinggi
27.	Standar Harga Satuan	BPKAD	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;	Juni	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
28.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027	Bappeda	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan	Juni	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

			Rencana Kerja Pemerintah Daerah.		
29.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027	Bappeda	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Juni	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
30.	Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	BPBD	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	Juni	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
31.	Kajian Risiko Bencana	BPBD	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Juni	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

32.	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 2. Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Mineral; 3. Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;	Juni	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
33.	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Provinsi Banten 2026 -2030	Bappeda	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Juni	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
34.	Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2026-2046	DPMPTSP	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penanaman Modal	Juli	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

35.	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah	Biro Organisasi	1. Peraturan Mneteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; 2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah	Juli	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
36.	Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan bagi Jabatan Manajerial dan non Manajerial ASN	Biro Organisasi	1. Peraturan Mneteri PAN dan RB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah	Agustus	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
37.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Bappeda	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang	Agustus	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

			Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.		
38.	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Bappeda	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Agustus	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

39.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	BPKAD	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Agustus	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
40.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	BPKAD	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Agustus	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
41.	Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Banten Lama	Dinas PUPR	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023 – 2043	Agustus	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
42.	Peninjauan Tarif Retribusi	Bapenda	Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Agustus	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
43.		Bapenda	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara	Agustus	perintah peraturan perundang-

	Nilai Perolehan Air Permukaan		Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.		undangan yang lebih tinggi
44.	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2026	Bapenda	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2026; 2. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Agustus	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
45.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	BPKAD	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Oktober	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

46.	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten	BPKAD	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Oktober	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
47.	Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 Tahun 2023	Oktober	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
48.	Pengelolaan dan Penempatan Alat Tangkap Statis	Dinas Kelautan dan Perikanan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	Oktober	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
49.	Rencana Penanggulangan Bencana	BPBD	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Oktober	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

50.	Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten	Dinas PUPR	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023 – 2043	Oktober	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
51.	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	BPKAD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	November	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
52.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	November	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
53.	Pencabutan Peraturan Gubernur	Biro Hukum	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Desember	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

54.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	BPKAD	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Desember	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

GUBERNUR BANTEN,

ANDRA SONI